

# Analisis Kinerja Keuangan Dalam Otonomi Daerah Kabupaten Nias Selatan

**Samalua Waoma**

Program Studi Akuntansi STIE Nias Selatan  
Kabupaten Nias Selatan  
[samaluawaoma@gmail.com](mailto:samaluawaoma@gmail.com)

## *Abstract*

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan dalam otonomi daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah. Jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Metode analisis data analisis rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 dilihat dari rasio kemandirian sangat baik karena berada pada rasio  $\leq 10\%$ . Rasio ketergantungan keuangan setiap tahunnya mengalami penurunan sehingga ketergantungan keuangan daerah pada dana perimbangan semakin berkurang. Tingkat desentralisasi fiskal berfluktuasi, tahun 2007 berada pada kriteria tertinggi, tahun 2014 kategori sedang dan tahun 2008-2011 berada pada kriteria rendah sedangkan tahun 2006, 2012, 2013 dan 2015 sangat rendah. Rasio efektivitas juga mengalami fluktuasi, pada tahun 2006, 2011, dan 2012 mencapai sangat efisien, tahun 2013 dan 2015 pencapaian tujuan anggaran efektif, pada tahun 2008, dan 2010 cukup efektif. Pencapaian terendah pada tahun 2007, 2009 dan 2014 yaitu kurang efektif. Tingkat aktivitas keuangan daerah menunjukkan sebagian besar (>50%) APBD dialokasikan untuk kegiatan pembangunan bila dibandingkan dengan belanja rutin. Pertumbuhan pendapatan asli daerah, pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan masih sangat rendah rata-rata masih di bawah 1%. Sebaiknya Kabupaten Nias Selatan terus meningkatkan dan mengoptimalkan realisasi sumber-sumber pendapatan sehingga ketergantungan pada dana perimbangan dapat berkurang. Meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah. Menetapkan beberapa peraturan daerah yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan redistribusi daerah serta melakukan efisiensi terhadap belanja rutin dan pembangunan.

**Kata Kunci: Kinerja, Keuangan, Otonomi, Pemda**

## **Pendahuluan**

Salah satu daerah yang berada di kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang diberi otonomi daerah pada tahun 2003 adalah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan

Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humban Hasundutan. Menurut Widarta (2010:2) otonomi daerah adalah yang memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah hal ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 tahun 2004)

Salah satu hak yang diberikan kepada daerah otonom adalah merencanakan, mengelola dan melaksanakan sendiri sumber dan penggunaan keuangan daerahnya.

Sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahnya maka setiap tahunnya disusun suatu perencanaan keuangan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diharapkan dapat direalisasikan semaksimal mungkin. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Yani, 2002: 229). Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Selatan setiap tahunnya ada yang mencapai target ada juga yang belum. Berikut ini anggaran dan realisasi penerimaan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015.

Tabel 1  
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2006-2015

Thn	Anggaran (ribu Rp)			Realisasi (ribu Rp)			
	Pendapat an Daerah	Pembiayaa n Daerah	Jumlah	Pendapata n Daerah	Pembiayaa n Daerah	(ribu Rp)	%
2006	254.916.343	28.222.151	283.138.494	256.712.175	36.856.824	293.568.999	103,68
2007	300.601.320	122.557.780	423.159.100	300.680.557	0	300.680.557	71,06
2008	345.429.634	101.489.300	446.918.934	354.390.130	37.250.284	391.640.414	87,63
2009	361.514.360	230.000.000	591.514.360	374.031.578	39.314.815	413.346.393	69,88
2010	386.610.973	137.856.919	524.467.892	420.365.987	44.185.069	464.551.056	88,58
2011	456.912.412	94.807.059	551.719.471	451.454.059	97.867.698	589.321.757	106,82
2012	511.871.365	111.136.474	623.007.839	540.170.386	108.035.765	648.206.150	104,04
2013	782.595.258	53.125.020	835.720.278	625.481.944	142.749.819	768.231.763	91,92
2014	757.449.182	71.665.139	829.114.321	643.149.408	0	643.149.408	77,57
2015	783.248.764	89.423.712	872.672.476	814.895.232	0	814.895.232	93,38

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 di atas anggaran dan realisasi penerimaan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 mengalami kenaikan kecuali tahun 2014 mengalami penurunan. Demikian halnya realisasi penerimaan daerah dari tahun 2006-2013 dan tahun 2015 mengalami kenaikan kecuali

tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Ketercapaian realisasi penerimaan daerah tercapai pada tahun 2006, 2011 dan 2012. Pada tahun 2007-2010 dan tahun 2013-2015 tidak tercapai sesuai yang diharapkan. Persentase realisasi penerimaan daerah tertinggi pada tahun 2006 sebesar

106,82% dan terendah pada tahun 2009 hanya sebesar 69,88%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 mengalami fluktuasi.

Salah satu penerimaan daerah Kabupaten Nias Selatan adalah pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD berasal dari

hasil asli daerah Kabupaten Nias Selatan dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah berasal dari dana provinsi dan dana pusat. Pada kenyataannya bahwa pendapatan daerah kabupaten Nias Selatan sebagian besar berasal dari provinsi dan pusat. Berikut ini data realisasi pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 sebagai berikut:

Tabel 2  
Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2006-2015

Tahun	PAD		Dana Perimbangan		Lain-Lain Pendapatan yang sah	
	(ribu Rp)	%	(ribu Rp)	%	(ribu Rp)	%
2006	4,150,392	1.62	247,818,560	96.54	4,743,223	1.85
2007	5,937,817	1.97	287,494,351	95.61	7,247,967	2.41
2008	10,515,155	2.97	319,779,877	90.23	24,095,098	6.80
2009	11,836,429	3.16	336,989,493	90.10	25,205,656	6.74
2010	12,840,750	3.05	360,711,923	85.81	46,813,314	11.14
2011	23,030,718	4.69	399,717,262	81.33	68,706,079	13.98
2012	12,146,969	2.25	469,146,621	86.85	58,876,795	10.90
2013	9,392,315	1.50	552,747,114	88.37	63,342,515	10.13
2014	12,828,006	1.86	585,343,366	84.95	90,900,704	13.19
2015	15,037,045	1.85	628,938,409	77.18	170,919,778	20.97
Jumlah	117,715,596	2.42	4,188,686,976	86.06	560,851,129	11.52

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu 2006-2015 belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan lebih besar dari dana perimbangan sebesar Rp 4.188.686.976 atau 86,06% disusul lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 560.851.129 atau 11,52% selanjutnya pada dari PAD hanya sebesar Rp 117.715.596 atau 2,42%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan keuangannya masih bergantung dari dana yang berasal dari pemerintahan provinsi dan pusat. Ciri utama kemandirian ini dapat dilihat dari ketergantungan daerah terhadap

pusat atau provinsi yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Menurut Darise (2009:2) "Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar". Menurut Bachrul (2002:7) "desentralisasi

berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat ke kepala daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi)". Sedangkan Halim dan Theresia, (2007:193) mengatakan bahwa "Derajat desentralisasi adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat.

Realisasi penerimaan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan digunakan untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahannya. Penggunaan dana tersebut lebih diutamakan untuk pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat dikarenakan bahwa keuangan daerah berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Hal ini dapat diketahui pada realisasi pengeluaran daerah setiap tahunnya. Berikut ini pengeluaran Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015:

Tabel 3  
Pengeluaran Daerah Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2006-2015

Tahun	Belanja Langsung		Belanja Tidak langsung		Pembiayaan Daerah		Jumlah
	(000 Rp)	%	(000 Rp)	%	(000 Rp)	%	
2006	60.322.265	20,55	54.931.227	18,71	178.314.507	60,74	293.568.999
2007	182.266.392	60,62	80.413.881	26,74	38.000.284	12,64	300.680.557
2008	218.586.432	55,81	97.472.113	24,89	75.581.869	19,30	391.640.414
2009	230.701.199	55,81	102.874.333	24,89	79.770.861	19,30	413.346.393
2010	259.280.079	55,81	115.618.234	24,89	89.652.743	19,30	464.551.056
2011	269.944.412	45,81	209.477.475	35,55	109.898.870	18,65	589.321.757
2012	424.483.239	65,49	198.245.730	30,58	25.477.181	3,93	648.206.150
2013	510.137.398	66,40	237.043.210	30,86	21.051.155	2,74	768.231.763
2014	253.358.921	39,39	465.652.255	72,40	-75.861.768	-11,80	643.149.408
2015	406.542.432	49,89	448.709.650	55,06	-40.356.850	-4,95	814.895.232
<b>Jumlah</b>	<b>2.815.622.769</b>	<b>52,85</b>	<b>2.010.438.108</b>	<b>37,74</b>	<b>501.528.852</b>	<b>9,41</b>	<b>5.327.591.729</b>

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui penggunaan pendapatan daerah dalam bentuk pengeluaran daerah lebih banyak pada belanja langsung (pelayanan publik) sebesar 52,85% bila dibandingkan dengan belanja tidak langsung (aparatur daerah) sebesar 37,74% disusul dengan pembiayaan daerah sebesar 9,41%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan keuangan daerah sudah memihak pada kepentingan rakyat karena keuangan daerah berasal dari rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat (publik).

Pembiayaan daerah tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Nias selatan mengalami defisit yang cukup besar yaitu Rp 75.861.768.000 atau 11,80% dan Rp 40.356.850.000 atau 4,95%. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan APBD pada tahun tersebut kurang efektif. Defisit ini akan dibebankan dan berpengaruh pada posisi kinerja keuangan pada tahun berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang dicapai setiap tahunnya. Sedangkan Hasil dari

penilaian kinerja keuangan dapat digunakan oleh berbagai pihak baik secara intern maupun ekstern pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan dalam otonomi daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan keuangan daerah.

### Landasan Teori

Setiap daerah yang diberi hak otonomi dalam menjalankan operasional pemerintahannya khususnya keuangan akan berpedoman pada APBD yang disusun setiap tahunnya. Tahapan APBD dimulai penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban. Pada tahap pelaksanaan setiap tahunnya pemerintah daerah akan mempertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SiLPA), laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Melalui LKPD akan dapat diketahui kinerja keuangan daerahnya. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah (Nordian, 2006).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* organisasi (Bastian, 2006:274). Sedangkan kinerja keuangan daerah menurut Sucipto (2007) "tingkat pencapaian suatu hasil kerja keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundangan selama satu periode anggaran". Menurut Harahap (2006) "Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Misalnya, antara utang dan modal, kas dan total aktiva, harga pokok penjualan dan penjualan, dan sebagainya". Menurut Harahap (2006) "Analisis rasio keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia."

Pengukuran kinerja keuangan akan mempunyai manfaat dan tujuan kepada berbagai pihak. Menurut Mardiasmo (2002:121) ada 3 tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain: (1). Memperbaiki kinerja pemerintah, (2). Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, dan (3). Mewujudkan pertanggungjawaban publik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dalam mengetahui kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan ukuran. Metode analisis kinerja keuangan daerah yang dapat diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur dalam setiap analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota/Provinsi. Menurut Halim (2011), "di dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio

pertumbuhan, dan rasio keserasian/ aktivitas. Sedangkan Menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (1991) pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat dari: (1). Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio PAD terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman, (2). Tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (dana Perimbangan), (3). Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah, (4). Rasio Efektivitas: Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan.

(5). Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =  $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah =  $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan APBD Tanpa Subsidi}} \times 100\%$
3. Rasio Desentralisasi Fiskal =  $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$
4. Rasio Efektivitas =  $\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$
5. Rasio aktivitas:

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil, (6) Rasio Pertumbuhan: (*Growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Untuk diketahuinya pertumbuhan di masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Nias Selatan. Sumber data adalah data skunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari (Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991):

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{dan Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

6. Rasio Pertumbuhan:

$$\text{Realisasi Penerimaan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - 1} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Jumlah Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - 1} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Belanja Rutin } X_n - 1} \times 100\% \text{ dan}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_n - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

X<sub>n</sub> = Tahun yang dihitung

X<sub>n-1</sub> = Tahun sebelumnya

Kriteria yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kinerja keuangan adalah:

Tabel 4

Kriteria Penilaian Kemandirian, Ketergantungan dan Desentralisasi Keuangan Daerah

Rasio Keuangan Daerah	Kemandirian	Ketergantungan	Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,000	Sangat baik	Sangat rendah	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Baik	Rendah	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup	Sedang	Sedang
30,01 – 40,00	Sedang	Cukup	Cukup
40,01 – 50,00	Kurang	Tinggi	Baik
>50,00	Sangat kurang	Sangat tinggi	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991)

Sedangkan kriteria penilaian efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah:

60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

Tabel 5

Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah
Di atas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif

### Hasil dan Pembahasan

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6

Rasio Kemandirian dan ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2015

Tahun	PAD (Rp)	Dana	Penerimaan	Rasio	Rasio
-------	----------	------	------------	-------	-------

		Perimbangan (Rp)	Daerah Tanpa Subsidi	Kamandirian		Ketergantungan	
				%	Kriteria	%	Kriteria
2006	3.878.283	252.833.892	8.893.615	1,53	Sangat Baik	46.67	Tinggi
2007	5.937.817	287.494.773	13.185.784	1,97	Sangat Baik	45.03	Tinggi
2008	10.515.155	319.779.877	34.610.253	2,97	Sangat Baik	30.38	Cukup
2009	11.836.429	339.989.493	37.042.085	3,16	Sangat Baik	31.95	Cukup
2010	12.840.750	360.711.923	59.654.064	3,05	Sangat Baik	21.53	Sedang
2011	23.030.718	399.717.262	91.736.797	4,69	Sangat Baik	25.11	Sedang
2012	12.146.969	469.146.621	71.023.764	2,25	Sangat Baik	17.10	Kurang
2013	9.392.315	552.747.114	72.734.830	1,50	Sangat Baik	12.91	Kurang
2014	12.826.006	585.343.366	103.728.710	1,99	Sangat Baik	12.37	Kurang
2015	15.037.045	628.938.409	185.956.823	1,95	Sangat Baik	8.09	Sangat Rendah

Sumber: Pengolahan Data tahun 2017

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa rasio kamandirian keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 berada pada interval 0,00-10,00 atau kriteria "sangat baik". Ini menandakan bahwa pada tahun 2006-2015 Kabupaten Nias Selatan sudah melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Hal ini perlu dipertahankan oleh Kabupaten Nias Selatan karena sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 mengalami penurunan atau ketergantungan terhadap pusat berkurang setiap tahunnya hal ini

menunjukkan bahwa kinerja keuangan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan makin berkurangnya ketergantungan keuangan daerah pada keuangan pusat dan provinsi. Tingkat kemampuan daerah Kabupaten Nias Selatan dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan optimalisasi PAD terlaksana dengan baik.

Hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal dan rasio aktivitas Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 ditunjukkan pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7  
Rasio Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas Keuangan Daerah  
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2015

Tahun	PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Target Pendapatan	Desentralisasi Fiskal		Efektivitas	
				%	Kriteria	%	Kriteria
2006	3.878.283	256,712,175	283,138,494	9,52	Sangat Rendah	103.68	Sangat Efektif
2007	5.937.817	300,680,135	423,159,100	45,03	Tinggi	71.06	Kurang Efektif
2008	10.515.155	354,390,130	446,918,934	14,63	Rendah	87.63	Cukup Efektif
2009	11.836.429	374,031,578	591,514,360	16,14	Rendah	69.88	Kurang Efektif
2010	12.840.750	420,365,987	524,467,892	12,37	Rendah	88.58	Cukup Efektif
2011	23.030.718	491,454,059	551,719,471	12,15	Rendah	106.82	Sangat Efektif
2012	12.146.969	540,170,385	623,007,839	6,78	Sangat Rendah	104.04	Sangat Efektif
2013	9.392.315	625,481,944	835,720,278	4,36	Sangat Rendah	91.92	Efektif
2014	12.826.006	689,072,076	829,114,321	22,19	Sedang	77.57	Kurang Efektif



2015	15.037.045	814,895,232	872,672,476	8,09	Sangat Rendah	93.38	Efektif
------	------------	-------------	-------------	------	---------------	-------	---------

Sumber: Pengolahan Data tahun 2017

Tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2006-2015 untuk melaksanakan pembangunan berfluktuasi. Hal ini terjadi disebabkan realisasi PAD setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan sedangkan realisasi total penerimaan daerah sebagai pembandingnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Desentralisasi fiskal tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 45,03% dan sangat rendah pada tahun 2006, 2012, 2013 dan 2015 yaitu berada pada interval 0,00-10,00. Pada tahun 2008-2011 berada pada interval 10,10-20,00 atau pada kriteria rendah sedangkan pada tahun 2014 sebesar 22,19% atau kategori sedang. Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan anggaran Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2006-2015 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006, 2011, dan 2012 mencapai tingkat tertinggi atau sangat efisien karena melebihi 100%. Tahun 2013 dan 2015 pencapaian tujuan anggaran efektif. Pada tahun 2008, dan 2010 cukup

efektif. Pencapaian terendah pada tahun 2007, 2009 dan 2014 yaitu kurang efektif.

Rasio aktivitas Kabupaten Nias Selatan ditunjukkan pada tabel 8. Kabupaten Nias Selatan sebagian besar (>50%) APBD dialokasikan untuk kegiatan pembangunan bila dibandingkan dengan belanja rutin pada tahun 2006-2015. Ini menandakan bahwa penggunaan pendapatan Kabupaten Nias Selatan lebih besar dialokasi untuk belanja investasi guna menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Hal ini perlu dipertahankan dikarenakan pendapatan daerah berasal dari rakyat dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat juga. Persentase belanja aparatur tertinggi tahun 2010 sebesar 50,60% yang berarti belanja pembangunan tahun yang sama lebih kecil hanya 49,21. Persentase belanja aparatur terendah tahun 2007 sebesar 25,65% yang menandakan bahwa sebagian besar APBD diarahkan pada belanja pembangunan sebesar 74,17%.

Tabel 8  
Rasio Aktivitas Keuangan Daerah  
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2015

Tahun	Total APBD	Belanja Rutin		Belanja Pembangunan	
		Rp	Rasio (%)	Rp	Rasio (%)
2006	283.138.494	102,915,296	36.35	179,606,966	63.43
2007	423.159.100	108,558,650	25.65	13,850,450	74.17
2008	446.918.934	18,518,522	26.52	10,400,412	69.45
2009	591.514.360	200,184,690	33.84	90,329,670	65.99
2010	524.467.892	65,398,522	50.60	58,069,370	49.21
2011	551.719.471	238,523,054	43.23	85,196,417	51.69
2012	623.007.839	246,557,095	39.58	65,950,744	58.74
2013	835.720.278	274,948,059	32.90	543,772,219	65.07
2014	829.114.321	318,587,709	38.43	508,526,612	61.33
2015	872.672.476	337,555,416	38.68	533,117,060	61.09

Sumber: Pengolahan Data tahun 2017

Berdasarkan tabel 9 di bawah ini dapat dilihat pertumbuhan pendapatan daerah, PAD, belanja rutin dan belanja pembangunan. Pada dasarnya pendapatan mengalami pertumbuhan tetapi masih sangat rendah yaitu dibawah 1%. Hal ini disebabkan alokasi dana perimbangan dari pusat ke Kabupaten Nias Selatan masih belum optimal. Pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,20% dan terendah tahun 2014 sebesar

0,03%. Demikian halnya pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun masih sangat rendah yaitu masih dibawah 1% bahkan tahun 2012 dan 2013 bukan pertumbuhan yang terjadi tetapi penurunan. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengelolaan sumber daya sebagai penyumbang PAD Kabupaten Nias Selatan. Hal ini memerlukan perhatian besar kepada Kabupaten Nias Selatan untuk meningkatkan penerimaan PAD.

Tabel 9  
Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah  
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2015

Tahun	Pendapatan		PAD		Belanja Rutin		Belanja Pembangunan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
2006	256,712,175	0	4,150,392	0	60,322,265	0	54,931,227	0
2007	300,680,557	0.17	5,937,817	0.43	182,266,392	2.02	80,413,881	0.46
2008	354,390,130	0.18	10,515,155	0.77	218,586,432	0.20	97,472,113	0.21
2009	374,031,578	0.06	11,836,429	0.13	230,701,199	0.06	102,874,333	0.06
2010	420,365,987	0.12	12,840,750	0.08	259,280,079	0.12	115,618,234	0.12
2011	451,454,059	0.07	23,030,718	0.79	269,944,412	0.04	209,477,475	0.81
2012	540,170,386	0.20	12,146,969	-0.47	424,483,239	0.57	198,245,730	-0.05
2013	625,481,944	0.16	9,392,315	-0.23	510,137,398	0.20	237,043,210	0.20
2014	643,149,408	0.03	12,828,006	0.37	253,358,921	-0.50	465,652,255	0.96
2015	814,895,232	0.27	15,037,045	0.17	406,542,432	0.60	448,709,650	-0.04

Sumber: Pengolahan Data tahun 2017

Penggunaan APBD untuk belanja rutin dan belanja pembangunan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan belanja rutin tertinggi tahun 2007 sebesar 2,02% disebabkan oleh belanja rutin pada tahun sebelumnya sangat kecil sedangkan terendah tahun 2014 hal ini dikarenakan APBD lebih besar dialokasikan pada belanja pembangunan dan belanja rutin tahun 2013 sangat tinggi. Pertumbuhan belanja pembangunan masih dibawah 1% tertinggi tahun 2014 sebesar 0,81% dan terendah atau terjadi penurunan pada tahun 2012 dan 2015 masing-masing -0,05% dan -0,04%.

Dengan mengetahui pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber

pendapatan dan pengeluaran Kabupaten Nias Selatan dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Potensi yang perlu mendapat perhatian adalah pada pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan. Hal merupakan hal yang sangat penting dikarenakan PAD berasal dari asli daerah untuk menuju kemandirian dan belanja pembangunan untuk investasi dan pelayanan publik.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten

Nias Selatan tahun 2006-2015 dilihat dari rasio kemandirian sangat baik. Rasio ketergantungan keuangan mengalami penurunan setiap tahunnya atau ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat mulai berkurang. Tingkat desentralisasi berfluktuasi ada yang menurun dan ada yang membaik. Tingkat desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2007 dan terendah tahun 2006, 2012, 2013 dan 2015. Rasio efektivitas Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 juga mengalami fluktuasi. Tahun 2006, 2011, dan 2012 mencapai sangat efisien. tahun 2013 dan 2015 pencapaian tujuan anggaran efektif. Tahun 2008, dan 2010 cukup efektif. Pencapaian terendah pada tahun 2007, 2009 dan 2014 yaitu kurang efektif. Penggunaan APBD sebagian besar (>50%) untuk kegiatan pembangunan bila dibandingkan dengan belanja rutin, pertumbuhan pendapatan asli daerah, pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan masih sangat rendah rata-rata masih dibawah 1%.

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan kinerja keuangannya adalah meningkatkan dan mengoptimalkan realisasi sumber-sumber pendapatan sehingga ketergantungan pada dana perimbangan dapat berkurang. Meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah. Menetapkan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan restribusi daerah. Melaksanakan efisiensi terhadap belanja rutin dan pembangunan.

#### Daftar Pustaka

- Bachrul, Elmi. (2002) *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press)
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM, (1991), *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Darise Nurlan, 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dan BLU*. (Pengantar Gusnar Ismail dan Idris Rahim). penerbit, Indeks Jakarta.
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. (2007) *Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi ketiga UPP AMP YKPN.
- Harahap Sofyan Sahri, 2006. *Analitis Kritis atas Laporan Keuangan*, Raja Grafindo, Jakarta
- Mardiasmo (2002), *Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Nordiawan, Dedi, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humban Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara*.
- Sucipto, (2007) *Penilaian Kinerja Keuangan*, Jurnal Akuntansi USU. Artikel online melalui <http://library.usu.ac.id/akuntansi-sucipto>. diakses 06/02/2018.
- Widarta 2010. *Otonomi Daerah bermakna kebebasan dan kemandirian daerah dalam penentuan langkah-langkah sendiri*. Bandung.
- Yani, Ahmad. (2002) *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.